

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan senantiasa memerlukan sumber pendapatan yang mampu diandalkan, kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang di mulai tanggal 1 Januari Tahun 2001. Dengan berlakunya otonomi daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, daerah otonom mencari sumber pendapatan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yaitu Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan antara lain dengan jalan meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pungutan. Jenis Pajak Provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena banyak menunjang pembiayaan daerah.

Pengelolaan pemungutan dan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait di dalam pengelolaannya. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

SAMSAT dalam menjalankan tugasnya melibatkan tiga instansi yang berbeda yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pt. Jasa Raharja (Persero), untuk itu maka diperlukan koordinasi untuk menertibkan jalannya kegiatan operasional

dilapangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengarahan merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dapat mempengaruhi efektivitas individu, efektivitas kelompok dan efektivitas organisasi. Integrasi kegiatan melalui koordinasi tentunya akan membantu mewujudkan tujuan tiap instansi. Untuk menunjang agar tujuan tersebut dapat tercapai, masing-masing instansi mempunyai wewenang dan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada atasannya masing-masing.

Namun demikian, wewenang dan tanggungjawab tersebut perlu dikoordinasikan secara bersama-sama sepanjang terkait dengan pelaksana teknis SAMSAT. Oleh karena itu SAMSAT dalam melaksanakan kinerjanya dibina dan dibimbing secara terus menerus oleh Tim Pembina SAMSAT yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Koordinasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan petugas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dimana koordinasi, komunikasi dapat berjalan dengan baik sehingga efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjalan dengan baik pula. Maka pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor akan terus meningkat sehingga target tercapai dengan hasil yang memuaskan. Tetapi jika koordinasi ini lemah maka tingkat efektivitas akan kurang sehingga target sasaran tidak tercapai.

Adapun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Palabuhanratu, dapat dilihat dari data dibawah ini:

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor SAMSAT Palabuhanratu Bulan Februari Tahun 2017

Minggu ke 1 s/d tgl 01 Februari 2017					
No	Jenis Pungutan	Target Murni	Realisasi	%	Sisa Murni
1	PKB	41.501.000.000	3.612.623.900	8.7	37.888.376.100
Minggu ke 2 s/d tgl 6-11 Februari 2017					
2	PKB	41.501.000.000	4.409.294.900	10.6	37.091.705.100
Minggu ke 3 s/d Tgl 13-18 Februari					
3	PKB	41.501.000.000	5.055.616.700	12.2	36.445.383.300
Minggu ke 4 s/d Bulan Februari 2017					
4	PKB	41.501.000.000	5.792.476.800	14	35.708.523.200
Minggu ke 5 s/d 20-25 Februari 2017					
5	PKB	41.501.000.000	6.020.878.100	14.5	35.480.121.900

Sumber: Subag Tata Usaha SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 2018

Berdasarkan data diatas laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terlihat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan target sehingga Pajak Kendaraan Bermotor masih belum efektif hal tersebut di duga masih kurangnya koordinasi antar instansi terlihat dari beberapa indikator permasalahan berikut ini.

- Koordinasi antar instansi di SAMSAT Palabuhanratu lemah dilihat dari target dan realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan.
- Rasa empaty dalam pelayanan rendah, dibuktikan dengan adanya perlakuan yang tidak adil oleh petugas SAMSAT dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

- Kurangnya media dan fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terlihat dari kurangnya pengetahuan dalam membayar pajak dan persyaratan dalam mengurus STNK atau membayar pajak.

Penulis beranggapan bahwa salah satu faktor tidak tercapainya efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor ini disebabkan karena lemahnya koordinasi fungsional antara instansi terkait sebagai pelaksana operasional.

Maka berdasarkan dari indikasi-indikasi permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Koordinasi Antar Instansi Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi”

B. Identifikasi Masalah

Masalah merupakan suatu kesulitan yang mengharuskan setiap orang untuk berusaha mencari solusi dalam mengatasi atau memecahkannya. Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinator intern yaitu unsur kepolisian kurang memonitoring seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pajak.
2. Tidak ada evaluasi kinerja antar instansi terhadap penangana keluhan atau masalah wajib pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

3. Komunikasi yang terjalin antara pelayanan SAMSAT keliling dengan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pajak kendaraan bermotor sehingga mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi masih perlu ditingkatkan agar hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat lebih besar dan target akan tercapai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan identifikasi masalah, maka peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kesauan tindakan terhadap efektivitas peningkatan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi?
2. Seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas peningkatan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi?
3. Seberapa besar pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi?
4. Seberapa besar pengaruh kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin secara silmutan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mengenai suatu masalah tentu mempunyai tujuan, dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesatuan tindakan terhadap efektivitas peningkatan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi terhadap efektivitas peningkatan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembagian kerja terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperoleh dan mengetahui suatu rumusan atau informasi yang akurat serta relevan yang dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi operasional dan pengembangan ilmu, terutama data empiric mengenai Pengaruh Koordinasi Antar Instansi Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan diri dalam lhazanah keilmuan, terutama dalam mengkaji permasalahan berkaitan dengan dunia Administrasi Publik dan berlandaskan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis dalam bidang Administrasi Publik dan dapat memperbanyak *literature* penelitian, sehingga Ilmu Administrasi Publik terus maju dan berkembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sebagai masukan dan memberikan sumbangan pemikiran yang lebih rasional bagi pengembangan dan penerapan administrasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu studi penelitian perlu adanya kejelasan titik tolak atau landasan berpikir untuk memecahkan dan membahas masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori sebagai pedoman yang menggambarkan dari mana sudut masalah tersebut di sorot.

Kerangka pemikiran adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Suatu organisasi dibentuk karena adanya tujuan yang akan dicapai agar tujuan organisasi tercapai maka diperlukan usaha-usaha oleh sekelompok orang melalui kerjasama. Kerjasama yang baik akan memungkinkan tercipta jika diantara komponen-komponen di dalam organisasi tersebut terjalin koordinasi yang baik. melalui koordinasi, keselarasan usaha dari bagian-bagian tersebut kearah pencapaian tujuan bersama dapat dilakukan. Tanpa koordinasi, individu-individu dan unit-unit dalam organisasi akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

Keterkaitan antara koordinasi dan efektivitas adalah bahwa koordinasi yang kuat dapat mempengaruhi efektivitas organisasi karena untuk mencapai efektivitas maka dibutuhkan koordinasi.

Menurut Stoner dalam Sugandha (1991:12) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian dan bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses penyatupaduan atau penyelerasan dari unit-unit organisasi yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga segala usaha organisasi diarahkan kepada tujuan bersama yang telah ditetapkan dimana diharapkan tidak terdapat kekacauan, *overlapping* dan kekosongan pekerjaan baik orang maupun jabatan, seperti dikemukakan oleh Hasibuan berikut ini.

Koordinasi dapat diartikan menggerakkan segala usaha organisasi untuk melaksanakan usaha sebanyak mungkin atau koordinasi berarti usaha untuk mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan, kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Orang-orang dan pekerjaannya disalurkan dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Koordinasi yang baik dapat diciptakan apabila faktor-faktor koodinasi dilaksanakan dengan baik, Hasibuan berpendapat pula bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi adalah kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah apabila faktor-faktor koordinasi dilaksanakan dengan baik maka koordinasi akan dapat berjalan dengan efektif dan selanjutnya diharapkan efektivitas penerimaan pajak akan tercapai.

Dalam hal ini, koordinasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan petugas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotr (PKB). Dimana koordinasi, komunikasi dapat berjalan dengan baik sehingga efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ini berjalan dengan baik pula, maka pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan terus meningkat sehingga target tercapai dengan hasil yang memuaskan. Tetapi jika koordinasi ini lemah maka tingkat komunikasi, koordinasi dan tingkat kemampuan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini akan kurang sehingga target sasaran tidak tercapai.

Mengenai pengertian efektivitas menurut Sumaatmadja (2006: 42) bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya tujuan. Kecepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan langkah kemampuan untuk mencapai tujuan sebelumnya. Diketahui bahwa efektivitas dalam proses penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini tidak bisa mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan, agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga yang direncanakan tercapai. Efektivitas menekankan pada tercapainya tujuan atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertahankan

mekanisme dalam pencapaian tujuan atau sasaran-sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dalam hal ini yaitu pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Palabuhanratu.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil penerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) akan sesuai target yang direncanakan jika didalamnya terdapat kordinasi yang kuat. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing aktor tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama., sehingga berpengaruh terhadap efektivitaas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Pencapaian koordinasi diperlukan untuk mencapai hubungan kerja yang terpadu dan terencana dengan dukungan aktif dari semua unsure organisasi dalam upaya pencapaian tujuan secara efektif, sejalan dengan pendapat dari Indrawati, yang mengemukakan bila suatu tujuan tertentu akan dicapai secara efektif oleh suatu usaha bersama, maka adalah logis setiap waktu tadi akan memberikan hasil maksimal untuk mencapai tujuan tertentu.

Keterkaitan antara koordinasi dengan efektivitas dikemukakan oleh Terry yang dikutip oleh Hasibuan (2006:85), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

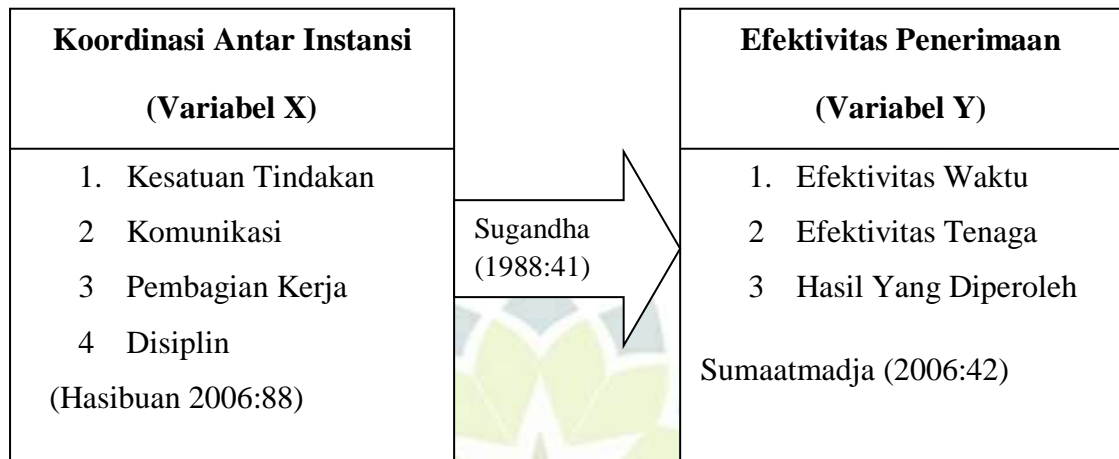
Hubungan koordinasi dan efektivitas dikemukakan juga oleh Sugandha (1988:41), agar di dalam suatu organisasi atau di dalam administrasi pemerintahan terdapat hasil kerja yang efektif, maka setiap kegiatan manusianya harus terkoordinasi.

Karena Koordinasi dapat menyatupadankan setiap gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi yang berbeda fungsi tetapi mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan secara efektif, maka dengan demikian koordinasi sangat berhubungan erat dan sangat berpengaruh positif dan signifikan dalam suatu instansi atau organisasi untuk mencapai efektivitas kerja yang diberikan oleh instansi atau organisasi.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

Skema Paradigma Kerangka Berpikir



G. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba merumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

$H_0: P_{xy} = 0$: artinya tidak terdapat pengaruh antara koordinasi terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

$H_a: P_{xy} \neq 0$: artinya terdapat pengaruh antara koordinasi terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).